



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG  
UNTUK PEJALAN KAKI**

**Nomor : 01/PRT/Db/2019**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2019

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA**

**SUGIYARTANTO**

**NIP : 1961122 199103 1 002**

Nomor Salinan

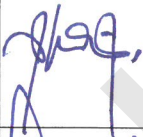


Status Dokumen



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 29

## PENGESAHAN

URAIAN	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
DISUSUN OLEH	<b>Ir. BOWO SUDIATMANTO, M.T.</b> Kasubdit Perencanaan dan Pemrograman, Direktorat Jembatan		
DIPERIKSA OLEH	<b>Ir. IWAN ZARKASI, M.Eng.Sc</b> Direktur Jembatan		
DISAHKAN OLEH	<b>Ir. SUGIYARTANTO, M.T.</b> Direktur Jenderal Bina Marga		

STATUS DOKUMEN			
NO. DISTRIBUSI			
TANGGAL			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 29

## DAFTAR ISI

U R A I A N	Hal.
PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
SEJARAH DOKUMEN	3
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI	4
1. Tujuan	5
2. Ruang Lingkup	5
3. Acuan	5
4. Definisi	7
5. Lingkup Hibah	8
6. Organisasi Pengelola	8
7. Mekanisme Pengusulan	8
8. Mekanisme Evaluasi	9
9. Mekanisme Pemrograman dan Perencanaan Teknis	11
10. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyerahan	11
11. Kondisi Khusus	11
12. Tata Cara	12
13. Bukti Kerja	14
14. Lampiran	15

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 3 dari 29

## SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
26 Juni 2018	Prosedur Pemrograman Pembangunan Jembatan Gantung untuk Pejalan Kaki diterbitkan	
18 April 2019	<p>Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. halaman 6 poin 3. Acuan bagian 3.13, 3.14;</li> <li>2. halaman 9 poin 7. Mekanisme Pengusulan bagian a.3.;</li> <li>3. halaman 10 poin 8. Mekanisme Evaluasi bagian 8.2 Kriteria Evaluasi Usulan nomor 2, 3, 4, dan 5;</li> <li>4. halaman 11 poin 8. Mekanisme Evaluasi bagian 8.2 Kriteria Evaluasi Usulan nomor 6 dihilangkan;</li> <li>5. halaman 21 Lampiran 7 tabel B. Akses Transportasi bagian 3;</li> <li>6. halaman 25 Lampiran 7 tabel F. Readiness Kriteria dan Partisipasi Pengusul Jembatan bagian Keterangan Kondisi Jembatan Eksisting;</li> <li>7. halaman 27 Lampiran 7 tabel G. Survey Detail Jembatan bagian 19 Kebutuhan Aktual Tipe Bentang Jembatan Gantung;</li> <li>8. <i>tata cara</i> halaman 12 dan 13.</li> </ol>	Rev-01

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 4 dari 29

	<p>Penambahan</p> <p>9. halaman 4 nomor 025, 026, 027, dan 028;</p> <p>10. halaman 11 bagian 10. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyerahan bagian 3;</p> <p>11. halaman 21 Lampiran 7 tabel B. Akses Transportasi poin 4.</p>	
8 Mei 2019	Perubahan halaman pengesahan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 4a dari 29

## DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	DJBHP
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX	BPJN XIX

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 4b dari 29

026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX	BPJN XX
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI	BPJN XXI
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII	BPJN XX
029	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 6 dari 29

## 1. Tujuan

Program pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk mendukung Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Secara lebih spesifik, pembangunan jembatan gantung dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatasi:

- a. pembangunan antardesa yang tidak merata, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan;
- b. pengembangan wilayah yang masih tersentralisasi, akses transportasi antardesa yang belum terhubung dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya, serta sebagai fasilitas untuk mitigasi atau evakuasi bencana; dan
- c. pembangunan infrastruktur yang belum memadai untuk desa yang terisolasi dan desa terluar.

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara dan alur kerja yang mencakup evaluasi dan penilaian usulan dan pemrograman jembatan gantung.

## 2. Ruang Lingkup

Dokumen ini adalah prosedur pemrograman pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

## 3. Acuan

- 3.1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 3.2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
- 3.3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
- 3.4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 3.5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 7 dari 29

- 3.6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
- 3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
- 3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
- 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- 3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- 3.11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
- 3.12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan BMN;
- 3.14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki;
- 3.15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2015, tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan;
- 3.16. Standar Operasional Prosedur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor SOP/UPM/DJBM-49 tentang Prosedur Hibah BMN berupa Alat Berat, Bahan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah.

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 29

#### 4. Definisi

- 4.1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 4.2. Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas adalah :
  - a. Jembatan;
  - b. Lintas atas;
  - c. Lintas bawah;
  - d. Jalan layang; dan
  - e. Terowongan.
- 4.3. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
- 4.4. Jembatan Khusus adalah jembatan dengan kriteria :
  - a. Jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
  - b. Jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, jembatan gantung dan jembatan beruji kabel;
  - c. Jembatan dengan total panjang paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
  - d. Jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter; dan
  - e. Jembatan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.
- 4.5. Jembatan Gantung adalah bangunan atas jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut, terdiri dari lantai jembatan, gelagar pengaku, batang penggantung, kabel pemikul dan pagar pengaman.
- 4.6. Pemrograman adalah kegiatan yang mencakup penyiapan alternatif penanganan, evaluasi strategi penanganan, konfirmasi penanganan untuk setiap jembatan, kaji ulang program sesuai dengan ketersediaan dana/keterbatasan anggaran.
- 4.7. Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*)  
 Peristiwa penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemennya kepada Pemilik/Direksi Pekerjaan, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam Kontrak.



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 29

- 4.8. Serah terima (*Final Hand Over*) adalah penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada pengguna jasa setelah melewati masa pemeliharaan.
- 4.9. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

## 5. Lingkup Hibah

Aset jembatan gantung yang dihibahkan meliputi :

1. bangunan atas, yang diadakan oleh Kementerian PUPR;
2. bangunan bawah, jika dibangun oleh Kementerian PUPR;
3. jalan akses, maksimum 100 m jika dibangun oleh Kementerian PUPR; dan
4. dokumen teknis.

## 6. Organisasi Pengelola

Untuk mengelola pemrograman pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki dibentuk Tim Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri atas unsur-unsur yang terkait dengan program pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki.

Tim Kerja terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga.

## 7. Mekanisme Pengusulan

Mekanisme ini menggambarkan proses pengusulan program pembangunan jembatan gantung pejalan kaki mulai dari penyampaian surat dan proposal oleh pengusul kepada Menteri PUPR hingga serah terima hibah jembatan gantung pejalan kaki. Mekanisme pengusulan program pembangunan jembatan gantung pejalan kaki adalah sebagai berikut:

- a. Daerah dapat menyampaikan usulan program pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki dengan persyaratan, sebagai berikut :
  1. Surat usulan dari masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah desa, unsur TNI dan/atau DPR/DPRD yang diteruskan oleh pemerintah daerah (gubernur, walikota, bupati) kepada Menteri PUPR. Usulan juga dapat berasal dari lembaga pendidikan tinggi kepada Menteri PUPR;
  2. Surat sebagaimana pada butir (1) disertai dengan proposal yang menggambarkan sekurang-kurangnya kondisi wilayah, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 9 dari 29

- kesesuaian lokasi, manfaat, dan urgensi usulan jembatan gantung termasuk peta, foto lokasi, dan kebutuhan biaya rencana jembatan yang diusulkan;
3. Surat pernyataan dari pengusul bahwa lahan untuk jalan akses dan lahan pondasi jembatan gantung telah tersedia;
  4. Surat pernyataan dari pemerintah daerah/lembaga pendidikan tinggi bersedia menerima hibah jembatan gantung serta sanggup memelihara jembatan gantung tersebut;
  5. Surat pernyataan dari pemerintah daerah/lembaga pendidikan tinggi bahwa tidak ada sumber pendanaan lain untuk penyediaan/konstruksi bangunan atas jembatan gantung yang diusulkan; dan
  6. Surat pernyataan sanggup menyediakan fasilitator dan pokmas (kelompok masyarakat) saat konstruksi dan operasional/pemeliharaan jembatan gantung.
- b. Usulan tidak akan dilakukan evaluasi apabila dokumen sebagaimana pada butir (a) tidak lengkap.

## **8. Mekanisme Evaluasi**

### **8.1. Prosedur Evaluasi Usulan**

1. Berdasarkan dokumen sebagaimana pada butir (7.a), Menteri PUPR memerintahkan Dirjen Bina Marga untuk melakukan evaluasi.
2. Dirjen Bina Marga selaku ketua Tim Pengarah memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan evaluasi berdasarkan kriteria penilaian untuk membuat prioritas usulan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah.
3. Tim Pelaksana meminta bantuan BBPJN/BPJN untuk memverifikasi proposal yang terkait dan melakukan survey lengkap.
4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi dan survey yang dilakukan oleh BBPJN/BPJN, Tim Kerja melakukan penilaian berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan dan membahas usulan – usulan tersebut dalam rapat pleno sehingga menghasilkan daftar tentatif prioritas yang dituangkan dalam berita acara usulan prioritas lokasi pembangunan jembatan gantung. Tim Pelaksanan dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana untuk memverifikasi kembali usulan jembatan gantung.
5. Tim kerja menyampaikan berita acara usulan prioritas lokasi pembangunan jembatan gantung kepada Menteri PUPR.



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 10 dari 29

6. Menteri PUPR dapat memilih program jembatan gantung berdasarkan Berita Acara usulan prioritas.
7. Tim Kerja menyusun konsep jawaban Menteri PUPR tentang persetujuan atau penolakan terhadap usulan jembatan gantung berdasarkan arahan Menteri PUPR.
8. Menteri PUPR menyampaikan surat persetujuan atau penolakan kepada Pengusul (pemerintah daerah/lembaga pendidikan tinggi) terkait dengan usulan program jembatan gantung.

## 8.2. Kriteria Evaluasi Usulan

Usulan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana pada poin (6.a) dapat dilanjutkan dengan evaluasi secara teknis yang disertai survei lapangan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:

1. administrasi (5%) berdasarkan data poin (7.a):
  - surat usulan ditandatangani oleh gubernur/walikota/bupati (100%); atau
  - surat usulan ditandatangani oleh kepala/ketua lembaga pendidikan tinggi (100%).
2. akses transportasi (20%):
  - tidak tersedia prasarana penyeberangan (100%);
  - tersedia prasarana penyeberangan nonjembatan (75%); atau
  - tersedia jembatan lain minimal 5 km atau 30 menit dengan bersepeda dari lokasi usulan (50%).
3. aktivitas ekonomi (manfaat) (35%):
  - jumlah desa yang dihubungkan (30%);
  - jumlah kepala keluarga terhubung (20%); dan
  - aktivitas daerah yang dihubungkan (50%) :
    - aktivitas antara permukiman dengan fasilitas pendidikan/kesehatan/pusat pemerintahan (60%);
    - aktivitas antara permukiman dengan perkebunan/pertanian/peternakan (30%); atau
    - aktivitas lainnya (10%).
4. kepentingan strategis jembatan (20%):
  - pembuka daerah terisolasi (45%);
  - jalur evakuasi/mitigasi (45%); dan
  - kepentingan strategis lainnya (10%).
5. aspek teknis (20%):
  - kondisi jalan akses ke lokasi rencana jembatan gantung (35%);
  - jarak lokasi rencana jembatan gantung ke jalan nasional/provinsi/kabupaten (35%); dan

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 11 dari 29

- kerentanan terhadap gerusan dinding sungai di kepala jembatan (30%).

## 9. Mekanisme Pemrograman dan Perencanaan Teknis

1. Tim Kerja memeriksa kesiapan *Readiness Criteria*
2. Apabila terdapat partisipasi instansi pengusul maka Tim Kerja meminta pemenuhan komitmen kepala daerah terkait dengan penyediaan *Detailed Engineering Design* (DED)/bangunan bawah dan apabila tidak terdapat partisipasi instansi pengusul maka BBPJN/BPJN menyusun DED
3. Tim Kerja mengevaluasi DED
4. BBPJN/BPJN menyesuaikan DED hasil dari asistensi dengan Tim Kerja
5. BBPJN/BPJN menyusun RAB/Anggaran untuk RKAKL
6. Tim Kerja memeriksa usulan RAB
7. Menyusun program dalam DIPA/RKAKL

## 10. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyerahan

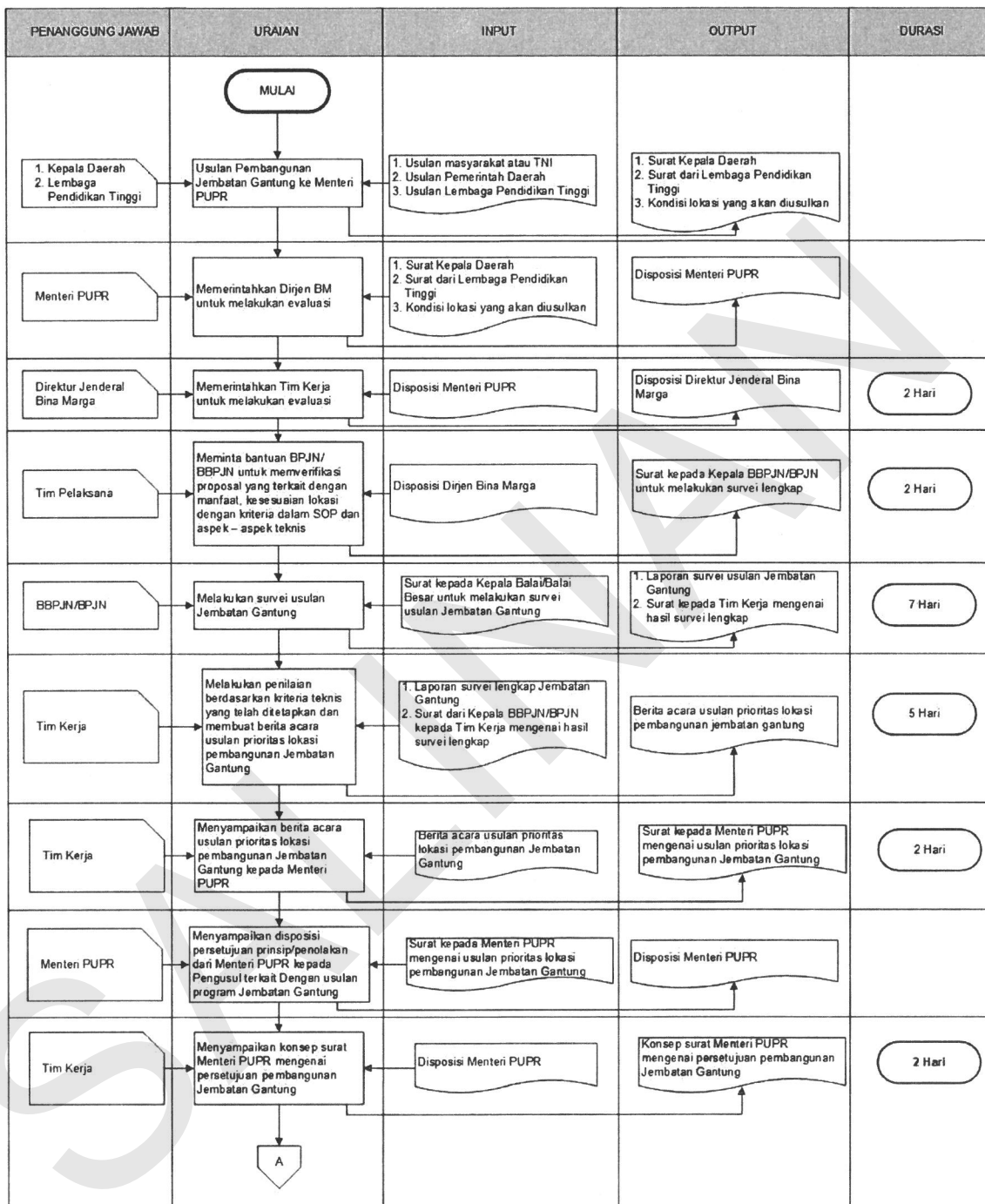
1. BBPJN/BPJN memeriksa kesiapan lahan dan dokumen teknis
2. BBPJN/BPJN melaksanakan konstruksi jembatan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait
3. Tim kerja melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan
4. BBPJN/BPJN mengusulkan hibah penyerahan jembatan gantung dari Kementerian PUPR kepada pemerintah daerah/lembaga pendidikan tinggi
5. Kementerian PUPR melakukan penyerahan hibah jembatan gantung kepada pemerintah daerah/lembaga pendidikan tinggi
6. Pemerintah daerah/lembaga pendidikan tinggi bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan jembatan gantung

## 11. Kondisi Khusus

Tidak ada.

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 29

## 12. Tata Cara :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 29

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN	INPUT	OUTPUT	DURASI
Menteri PUPR	Menandatangani surat Menteri PUPR mengenai persetujuan pembangunan Jembatan Gantung	Konsep surat Menteri PUPR mengenai persetujuan pembangunan Jembatan Gantung	Surat Persetujuan Menteri PUPR	
Tim Kerja	Menyampaikan surat Menteri PUPR mengenai persetujuan pembangunan Jembatan Gantung	Surat Persetujuan Menteri PUPR		2 Hari
	<p>Terdapat Partisipasi Instansi Pengusul</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p>			
Kepala BBPJN/ BPJN	1. Penyusunan DED 2. Pengusulan Program dan Anggaran Tahunan 3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dukungan	Surat Persetujuan Menteri PUPR	1. DED 2. Pengusulan Anggaran 3. Surat Dukungan Pemerintah Daerah	30 Hari
Pemerintah Daerah	Menyampaikan surat kepada Tim Kerja terkait komitmen dalam menyediakan DED, Bangunan Bawah, Pengangkutan, dan atau Pemasangan	Surat Persetujuan Menteri PUPR	Surat terkait komitmen Daerah	5 Hari
Tim Kerja	Pengecekan desain	Petunjuk teknis yang berlaku	1. Pembahasan desain 2. Rsalah rapat 3. Surat Pemenuhan Rangka Jembatan Gantung	7 Hari
Kepala BBPJN/ BPJN	Penyusunan RKAKL dan DIPA		1. RKAKL 2. DIPA 3. POK	
	Pelaksanaan konstruksi	1. Dokumen Lelang 2. Dokumen Kontrak	1. Berita acara FHO 2. Berita acara FHO	120 Hari
Kepala BBPJN/ BPJN	Mengusulkan hibah kepada Direktorat Jenderal Bina Marga	1. Berita Acara FHO 2. DIPA dan RKAKL 3. Surat kesediaan menerima hibah dari Pemerintah Daerah 4. Daftar barang yang akan dihibah 5. Surat pernyataan dari Satker yang mencatat barang 6. Surat pernyataan bahwa BMN dari awal pengadaan untuk dihibahkan	Surat Usulan Hibah	10 Hari setelah FHO
	SELESAI			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 29

### 13. Bukti Kerja

- 1) Dokumen Usulan Program;
- 2) Laporan rekapitulasi formulir survey;
- 3) Laporan kondisi sosial, ekonomi, budaya;
- 4) DED Pembangunan Jembatan;
- 5) RKAKL;
- 6) POK;
- 7) DIPA;
- 8) Berita Acara PHO;
- 9) Berita Acara FHO;
- 10) Laporan konstruksi jembatan;
- 11) Laporan serah terima aset jembatan.

### 14. Lampiran

- 1) Format Surat Kepala Daerah/Lembaga Pendidikan Tinggi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai permintaan pembangunan jembatan gantung (**Lampiran 1**);
- 2) Format Surat Pernyataan Kesiapan Penyediaan Lahan (**Lampiran 2**);
- 3) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Hibah (**Lampiran 3**);
- 4) Format Surat Pernyataan Kesiapan Menyediakan Fasilitator dan Kelompok Masyarakat (**Lampiran 4**);
- 5) Format Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Pendanaan Lain Untuk Bangunan Atas Jembatan Gantung (**Lampiran 5**);
- 6) Format Berita Acara Usulan Prioritas Lokasi Pembangunan Jembatan Gantung (**Lampiran 6**);
- 7) Form Survey Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki (**Lampiran 7**);
- 8) Form Tabel Prioritas (**Lampiran 8**);
- 9) Form Risalah Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Jembatan Gantung (**Lampiran 9**).

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 29

## Lampiran 1

### FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG

#### KOP SURAT

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada Yth.  
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

di  
Jakarta

Berdasarkan Surat Usulan dari masyarakat/TNI/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/DPR/DPRD No ....., tanggal ..... 20...., bersama ini kami mengajukan Permohonan Pembangunan Jembatan Gantung di ..... Tahun Anggaran 20....

Untuk mendukung Permohonan Pembangunan Jembatan Gantung tersebut, dengan ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Surat Usulan Pembangunan Jembatan Gantung dari masyarakat/LSM;
2. Proposal Pembangunan Jembatan Gantung;
3. Surat Pernyataan Kesiapan Penyediaan Lahan;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Hibah Jembatan Gantung dari Pemerintah Daerah/Lembaga Pendidikan Tinggi;
5. Surat Pernyataan Ketidaktersediaan Sumber Pendanaan Lain untuk Penyediaan/Konstruksi Bangunan Atas Jembatan Gantung dari Pemerintah Daerah/Lembaga Pendidikan Tinggi; dan
6. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitator dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) saat konstruksi dan operasional/pemeliharaan jembatan gantung.

Demikian, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

....., tanggal.....  
.....\*)

.....Nama.....

Tembusan Yth:  
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

\*)Diisi jabatan yang bertandatangan (Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi atau pejabat yang diberi Kuasa dan dilampirkan Surat Kuasa)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 29

## Lampiran 2

### FORMAT SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENYEDIAAN LAHAN

#### KOP SURAT

#### SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENYEDIAAN LAHAN

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (1)

Jabatan: ..... (2)

Selaku Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota ..... (3) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran telah tersedianya lahan untuk jalan akses dan pondasi jembatan gantung di ..... (4).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (5)

..... (6)

Materai (7)

..... (8)

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR

Keterangan:

- 1) Diisi nama penanggung jawab pembangunan jembatan gantung (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 2) Diisi jabatan penanggung jawab pembangunan jembatan gantung (Gubernur/ Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 3) Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Walikota
- 4) Diisi nama lokasi pembangunan jembatan gantung
- 5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- 6) Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 7) Diisi tanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 8) Diisi nama penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberi Kuasa)

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 29

### Lampiran 3

## FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERIMA HIBAH

### KOP SURAT

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....(1)

Jabatan : .....(2)

Bahwa Provinsi/Kabupaten.....(3) dengan ini menyatakan bersedia untuk menerima hibah berupa Jembatan Gantung..... (4) untuk mendukung pejalan kaki dan konektivitas antar wilayah. Pihak Penerima hibah sanggup dan bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan barang hibah dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah

Gubernur/Bupati.....(5)

Materai

.....(6)  
(NAMA)



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 18 dari 29

## Lampiran 4

### FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN FASILITATOR DAN KELOMPOK MASYARAKAT

#### KOP SURAT

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....(1)

Jabatan : .....(2)

Bahwa Provinsi/Kabupaten.....(3) dengan ini menyatakan bersedia untuk membentuk fasilitator dan kelompok masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat setempat saat konstruksi maupun pemeliharaan Jembatan Gantung.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah

Gubernur/Bupati.....(5)

Materai

.....(6)  
(NAMA)

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 29

## Lampiran 5

### FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI SUMBER PENDANAAN LAIN UNTUK BANGUNAN ATAS JEMBATAN GANTUNG

#### KOP SURAT

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....(1)

Jabatan : .....(2)

Bahwa Provinsi/Kabupaten.....(3) dengan ini menyatakan **tidak memiliki** sumber pendanaan lain untuk bangunan atas untuk Jembatan Gantung.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah

Gubernur/Bupati.....(5)

Materai

.....(6)

(NAMA)



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 29

## Lampiran 6

### BERITA ACARA USULAN PRIORITAS LOKASI PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG

Tim Kerja Program Pembangunan Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor..... Tanggal..... tentang Pembentukan Tim Kerja Program Pembangunan Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki telah menetapkan daftar prioritas usulan lokasi pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

1. Jembatan Gantung..... Kabupaten..... Provinsi.....
2. Dst...

Tim Kerja telah melaksanakan penilaian berdasarkan laporan hasil verifikasi dan survey yang dilakukan oleh BBPJM/BPJM terkait wilayahnya sehingga menghasilkan daftar prioritas usulan lokasi pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki tersebut diatas. Berdasarkan penilaian terhadap usulan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan, jumlah usulan pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki sebanyak ..... lokasi di ..... kabupaten di ..... provinsi.
2. Berita acara usulan prioritas lokasi pembangunan jembatan gantung dari Tim Kerja tidak menghilangkan/menghapuskan dan atau mengurangi hak prerogatif Menteri PUPR untuk menentukan prioritas pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, .....20.....

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 21 dari 29

## Lampiran 7

### FORM SURVEY JEMBATAN GANTUNG UNTUK PEJALAN KAKI

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

A. Administrasi				
No.	Pertanyaan	Kuantitas Penilaian		Kelengkapan Dokumen & Keterangan Lain
1	Surat usulan ditandatangani oleh	Gubernur	Ya/Tidak	
		Walikota	Ya/Tidak	
		Bupati	Ya/Tidak	
		Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi	Ya/Tidak	

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

B. Akses Transportasi			
No.	Pertanyaan	Kuantitas Penilaian	Kelengkapan Dokumen & Keterangan Lain
1	Tidak Tersedia Prasarana Penyeberangan	Ya/Tidak*	
2	Prasarana Penyeberangan Non Jembatan	Ya/Tidak*	
3	Jembatan Lain Minimal 5 Km atau 30 Menit Dengan Bersepeda dari Lokasi Usulan	Ada/ Tidak*	
4	Kondisi Jembatan Lain (jika ada)	Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat/Kritis*	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 22 dari 29

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

C. Aktivitas Ekonomi			
No.	Pertanyaan	Jawaban Kuantitatif	Kelengkapan Dokumen & Keterangan Lain
1	Jumlah desa yang dihubungkan	desa	
2	Jumlah KK terhubung	KK	
3	Menghubungkan aktivitas Permukiman- Fasilitas Pendidikan/ Kesehatan/Pemerintahan	Ya/Tidak*	
4	Menghubungkan aktivitas Aktivitas Permukiman - Perkebunan/ Pertanian/ Peternakan yang terhubung	Ya/Tidak*	
5	Aktivitas lainnya	Ada/Tidak*	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 23 dari 29

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

D. Kepentingan Strategis Jembatan			
NO.	Pertanyaan	Jawaban Kuantitatif	Kelengkapan Dokumen & Keterangan Lain
1	Jembatan akan menjadi jalur evakuasi/mitigasi	Ya/Tidak*	
2	Jembatan akan menjadi pembuka daerah terisolir	Ya/Tidak*	
3	Kepentingan strategis lainnya	Ada/Tidak*	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 24 dari 29

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

E. Aspek Teknis			
NO.	Pertanyaan	Jawaban Kuantitatif	Kelengkapan Dokumen & Keterangan Lain
1	Kondisi jalan akses ke jembatan eksisting/lokasi rencana jembatan gantung*	Tanah / Perkerasan.....	
		Lebar Jalan Akses : m	
2	Jarak lokasi rencana jembatan gantung ke jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten	km dari* jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	
3	Kerentanan terhadap gerusan dinding sungai di kepala jembatan eksisting*	Rentan/Tidak Rentan	(jika ada jembatan eksisting)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 25 dari 29

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

F. Readiness Criteria dan Partisipasi Pengusul Jembatan			
No.	Pertanyaan	Jawaban Kuantitatif	Kelengkapan Dokumen & Keterangan Lain
1	Lahan sudah bebas	Sudah/ Belum*	
2	Pemerintah Daerah menyediakan DED / bangunan bawah / pengangkutan dan pemasangan	Bersedia/Tidak*	

**Keterangan Kondisi Jembatan Eksisting :**

Baik : Dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya

Rusak Ringan : Dapat dilewati, namun membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan minor

Rusak Berat : Dapat dilewati namun membahayakan pengguna jalan

Kritis : Tidak dapat dilewati



Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 26 dari 29

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

G. Survey Detail Jembatan		
No.	Kategori	Keterangan
1	Nama Jembatan	
2	Kabupaten	
3	Kecamatan	
4	Lokasi (Desa)	
5	Disurvey oleh	
6	Tanggal survey	
7	Desa yang Dihubung-kan	
8	Nama Sungai	
9	Lebar Jalan Akses Eksisting (m)	
10	Lebar Sungai (m)	
11	Nama Jembatan	
12	Koordinat	
13	Tinggi muka air banjir dari rencana lantai jembatan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: Rev-01	Halaman	: 27 dari 29

*\*pilih salah satu, coret yang tidak perlu*

(Jika ada jembatan eksisting)			
No.	Kategori		Keterangan
14	Bangunan Atas	Tipe	
		Kondisi	
15	Lantai	Tipe	
		Kondisi	
16	Bangunan Bawah & Pondasi	Tipe	
		Kondisi	
17	DAS	Tipe	
		Kondisi	
18	Dimensi	Panjang (m)	
		Lebar (m)	
19	Kebutuhan Aktual Tipe Bentang Jembatan Gantung*	42 m Asimetris/Simetris	84 m Simetris
		60 m Asimetris/Simetris	96 m Simetris
			120 m Simetris
20	Keterangan Tambahan		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 28 dari 29

## Lampiran 8

### FORM TABEL PRIORITAS

Tanggal :

BPJN/BBPJN :

Provinsi :

Kabupaten :

NO.	KECAMATAN	LOKASI (DESA)	DAERAH TERHUBUNG	NAMA JEMBATAN	URUTAN PRIORITAS
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Nama Jelas, Instansi & Jabatan

Tanda Tangan

1.

1.

.....

2.

2.

.....

3.

3.

.....

4.


4.

.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: PR.01.02-Db/663	Tanggal Berlaku	:
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 29 dari 29

## Lampiran 9

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>  <b>D I R E K T O R A T J E M B A T A N</b>          Jalan Pattimura No. 20, Gd. Sapta Taruna Lt. VI, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telp. 7251544, 7251019 FAX. (021) 7247283</p>		
<b>RISALAH RAPAT</b>		
Judul : Pembahasan Rencana Pembangunan Jembatan Gantung ...		Risalah Rapat No.: Jumlah Halaman: ... Halaman
Lokasi Rapat: .....	Hari/ Tanggal Rapat: ...	Disusun Oleh: Nama ... NIP ...
Agenda Rapat : Pembahasan Rencana Pembangunan Jembatan Gantung ...		Pimpinan Rapat Tanda Tangan : Nama ... NIP ...
<b>Lampiran:</b> 1. Daftar hadir 2. Dokumentasi foto kegiatan		
<b>ITEM</b>	<b>DESKRIPSI</b>	
1		
2		
3		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**Tabel Updating SOP Pembangunan Jembatan Gantung Pejalan Kaki**

ITEM	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
1	Terdapat sejumlah 25 Unit Kerja	Terdapat sejumlah 29 Unit Kerja	Halaman 4
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Halaman 6 poin 3.13
3	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2019;	Halaman 6 poin 3.14
4	Surat pernyataan dari pengusul bahwa lahan untuk jalan akses dan lahan pondasi jembatan gantung telah tersedia atau surat kesiapan penyediaan lahan apabila lahan belum bebas. Jika pada saat konstruksi dimulai lahan belum bebas, maka usulan akan ditinjau ulang	Surat pernyataan dari pengusul bahwa lahan untuk jalan akses dan lahan pondasi jembatan gantung telah tersedia	Halaman 9 poin 7 nomor 3
5	Akses Transportasi (15%)	Akses Transportasi (20%)	Halaman 10 poin 8.2 nomor 2
6	Tersedia jembatan lain maksimal lebih dari 1 km dari lokasi usulan	Tersedia jembatan lain kurang dari 5 km atau 30 menit dengan bersepeda dari lokasi usulan	Halaman 10 poin 8.2 nomor 2
7	Aktivitas ekonomi (manfaat) (30%)	Aktivitas ekonomi (manfaat) (35%)	Halaman 10 poin 8.2 nomor 3

ITEM	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
8	Aktivitas antara permukiman dengan fasilitas pendidikan /kesehatan/pusat pemerintahan (50%)	Aktivitas antara permukiman dengan fasilitas pendidikan /kesehatan/pusat pemerintahan (60%)	Halaman 10 poin 8.2 nomor 3
9	Aktivitas antara permukiman dengan perkebunan /pertanian (40%)	aktivitas antara permukiman dengan perkebunan /pertanian /peternakan (30%)	Halaman 10 poin 8.2 nomor 3
10	Kepentingan strategis jembatan (15%)	Kepentingan strategis jembatan (15%)	Halaman 10 poin 8.2 nomor 4
11	Aspek teknis (15%)	Aspek teknis (20%)	Halaman 10 poin 8.2 nomor 5
12	Readiness criteria dan partisipasi pengusul jembatan gantung		Halaman 11 poin 8.2 nomor 6 Dihilangkan
13		Tim Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan;	Halaman 11 poin 10 nomor 3 Tambahan
14	Tata cara Rev-00	Tata cara Rev-01	Halaman 12 dan 13 Tambahan
15	Jembatan Lain Maksimal 1 Km Dari Lokasi Usulan	Jembatan Lain Kurang Dari 5 Km atau 30 Menit Dengan Bersepeda dari Lokasi Usulan	Halaman 21 poin 3
16		Kondisi Jembatan Lain (jika ada) Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat / Kritis	Halaman 21 Tambahan

ITEM	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
17	<p>Keterangan Kondisi Jembatan Eksisting :            Baik : Dapat berfungsi sesuai fungsinya            Sedang : Dapat dilewati, namun membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan minor            Buruk : Tidak dapat dilewati atau membahayakan pengguna jalan</p>	<p>Keterangan Kondisi Jembatan Eksisting :            Baik : Dapat berfungsi sesuai fungsinya            Rusak Ringan : Dapat dilewati, namun membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan minor            Rusak Berat : Dapat dilewati namun membahayakan pengguna jalan            Kritis : Tidak dapat dilewati</p>	Halaman 25
18	42 m Asimetris 60 m Asimetris 72 m Rigid Kelas I 72 m Rigid Kelas II 84 m Asimetris 96 m Asimetris 120 m Asimetris	42 m Asimetris / Simetris 60 m Asimetris / Simetris 84 m Simetris 96 m Simetris 120 m Simetris	Halaman 27 poin 19